

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: Alumni, 1982)
- Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Medan: Ghalia Indonesia, 2010)
- Eko Putro Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)
- Kamsir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)
- Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003)
- Lexy J, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya, 2014)
- M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986)
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- Mulyadi, Ekonomi Kelautan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2005)
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Philipus M, Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Balai Pustaka, 1987)

Rachmat Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Binacipta, 1977)

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)

Satjipto, Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)

Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas, 2005)

Supriadi Dan Alimuddin, Hukum Perikanan Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Sutedi, Hukum Perburuhan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)

Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta : Rajawali Press, 2008)

Zaeni Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 2007)

Jurnal

Candra Bagas Agus Nugroho dan Emmilia Rusdiana, PROBLEMATIKA YURIDIS JAMINAN SOSIAL BAGI NELAYAN BURUH DI INDONESIA, (NOVUM: JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya)

Ghana Chalid Gandyo, Amiek Soemarmi, Dan Eko Sabar Prihatin, Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Kecil Oleh Dinas Kelautan Dan Perikan Kabupaten Brebes, (Diponegoro Law Journal Vol 5 No 3 2016 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

Hanata Renggana, Ego, PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM DI DESA TASIKADU, (Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 2019 Fakultas Hukum Univesitas Islam Malang)

Lien Saraswati, Aisha, Tanggung Jawab Perusahaan Atas Kecelakaan Kerja Pekerja Outsourcing Yang Tidak Didaftarkan Bpjs Ketenagakerjaan, (Jurist-Diction Vol. 3 (4) 2020 Universitas Airlangga)

Sonhaji, Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam Upaya Pemenuhan Keselamatan Berlayar, (Adminitrative Law & Governance Journal Vol. 1 Edisi 3 Agustus 2018 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

Utomo, Hari, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB MENURUT HUKUM DALAM KECELAKAAN KAPAL (LEGALLY RESPONSIBLE PARTIES IN SHIP ACCIDENT), (Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017 Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Universitas Pertahanan)

Skripsi/Tesis

Deli Waryenti dan Patricia Ekowati Suryaningsih, “Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Bengkulu Dalam Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Repunlik Indonesia”, (Laporan Akhir Penelitian Dana PNBP, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2019)

Fatima S.T, “Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Nelayan Terhadap Penggunaan Bom Ikan Di Kabupaten Pangkep”, (Diploma thesis, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, 2015)

Heni Ika Priyanti, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DALAM PERUSAHAAN AKIBAT TIDAK DITERAPKANNYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016)

I Gusti Agung Ngurah Bagus Wiranata, Dewa Gede Rudy, Ida Bagus Putu Utama, “PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH PENGUSAHA BAGI PEKERJA WAKTU TERTENTU YANG TIDAK TERDAFTAR PROGRAM BPJS MENGALAMI KECELAKAAN KERJA PADA MARS CITY HOTEL DENPASAR”, (Makalah Ilmiah Ringkasan Skripsi Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018)

Wulan Fitriana, “Implementasi Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kecelakaan Kerja Bagi Nelayan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2016 (Di Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur)”, (Skripsi Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020)

Data/Laporan

Data Daftar Nelayan Peserta Ikut BPJS Ketenagakerjaan Perisai Koperasi P3 Kota Tegal Tahun 2019.

Data Daftar Nelayan Peserta Ikut BPJS Ketenagakerjaan Perisai Koperasi P3 Kota Tegal Tahun 2020.

Data Daftar Nelayan Peserta Ikut BPJS Ketenagakerjaan Perisai Koperasi P3 Kota Tegal Tahun 2021.

Sumber Internet

BPJS Ketenagakerjaan, Bukan Penerima Upah (BPU), Diakses melalui <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/bukan-penerima-upah.html#jkk> pada tanggal 02 Juni 2022.

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP, KKP Gandeng BPJS Ketenagakerjaan Wujudkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Subsektor Perikanan Tangkap, Diakses melalui <https://kkp.go.id/djpt/artikel/36777-kkp-gandeng-bpjs-ketenagakerjaan-wujudkan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-subsektor-perikanan-tangkap> pada tanggal 02 Juni 2022.

Farid Firdaus, Gatra 25 Januari 2020, Kartu Asuransi Nelayan di Tegal Dinilai Kurang Sosialisasi, Diakses melalui <https://www.gatra.com/detail/news/466966/kebencanaan/kartu-asuransi-nelayan-di-tegal-dinilai-kurang-sosialisasi> pada tanggal 30 September 2021.

Ferrika Sari, Kontan.co.id 16 Oktober 2018, Ada 3.645 perusahaan swasta tidak mendaftar BPJS Ketenagakerjaan, Diakses melalui <https://keuangan.kontan.co.id/news/ada-3645-perusahaan-swasta-tidak-mendaftar-bpjs-ketenagakerjaan> pada tanggal 23 Maret 2022.

Fiki Ariyanti, Cermati.com 21 Januari 2020, Iuran BPJS Ketenagakerjaan Tetap, Santunan Kecelakaan Kerja Dinaikkan, Diakses melalui

<https://www.cermati.com/artikel/amp/iuran-bpjs-ketenagakerjaan-tetap-santunan-kecelakaan-kerja-dinaikkan> pada tanggal 05 Juni 2022.

Kementerian Komunikasi dan Informatika, 04 Maret 2017 Artikel GPR, Bantuan Premi Asuransi Nelayan, Diakses melalui https://kominfo.go.id/content/detail/9456/bantuan-premi-asuransi-nelayan/0/artikel_gpr pada tanggal 06 Juni 2022.

Nurdian Akhmad, TopBusiness 3 November 2020, Jasindo Dapat 5 Penugasan Asuransi dari Pemerintah, Diakses melalui <https://www.topbusiness.id/42810/jasindo-dapat-5-penugasan-asuransi-dari-pemerintah.html> pada tanggal 29 September 2021.

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Kementrian Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua

Petunjuk Teknis KKP Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan Tahun 2022